

12-11-2021

## Analisis Implementasi Kebijakan TNI Dalam Menghadapi Ideologi Khilafah

Toufik Akbar Siddik  
*universitas indonesia, kom22kommil10@gmail.com*

muhamad syauqillah  
*Universitas Indonesia, syauqi\_oki@yahoo.com*

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/meis>



Part of the [Near and Middle Eastern Studies Commons](#)

---

### Recommended Citation

Siddik, Toufik Akbar and syauqillah, muhamad (2021) "Analisis Implementasi Kebijakan TNI Dalam Menghadapi Ideologi Khilafah," *Jurnal Middle East and Islamic Studies*: Vol. 8: No. 2, Article 2.  
DOI: 10.7454/meis.v8i2.135  
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/meis/vol8/iss2/2>

This Article is brought to you for free and open access by the School of Strategic and Global Studies at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Jurnal Middle East and Islamic Studies* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

## **ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TNI DALAM MENGHADAPI IDEOLOGI KHILAFAH**

**Toufik Akbar Siddik, Muhamad Syauqillah**

Program Studi Kajian Wilayah Timur Tengah dan Islam, Sekolah Kajian Strategik dan Global,  
Universitas Indonesia.

Program Studi Kajian Terorisme, Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia.

E-mail: kom22kommil10@gmail.com, syauqi\_oki@yahoo.com

### ***Abstract***

*Military threats are divided into three aspects, namely military threats, non-military and hybrid. The threat was happening in the TNI is an ideological threat that is transnational in nature, and this includes non-military. the threat of radicalism and ideology is rife and moves systematically and massively. With this condition, it is feared that it could damage the existence of Pancasila. The issue of the entry of radical understanding and the ideology of the caliphate into the TNI as evidenced by the circulation of one of the TNI videos supports one of the founders of the caliphate. This is the background for conducting case study analysis in this final project. the TNI issued preventive measures. One of the factors that strengthen the resilience of TNI soldiers in dealing with ideologies other than Pancasila is through existing policies, so the purpose of this research is to find out the forms of policies in the TNI and how to implement these policies. The methodology used is descriptive qualitative with data sources emphasizing interviews and documentation studies. The results of the study indicate that there are several forms of policy and good implementation in the field. From the results of this study, it is hoped that there will be input to the agency in order to increase resilience within the TNI.*

**Keywords: transnational ideology; policy implementation; the influence of the entry of the caliphate in the TNI**

### **PENDAHULUAN**

Ideologi khilafah merupakan ideologi yang banyak digunakan oleh kelompok ikhwanul muslimin yang berdiri di Mesir tahun 1928, kemudian kelompok Hizbut Tahrir yang berdiri di Jerusalem Timur pada tahun 1952. Saat ini dianut pula oleh kelompok ISIS di Iraq dan Syiria. Ideologi Khilafah merupakan suatu ancaman yang nyata karena termasuk kedalam bentuk radikalisme yang bisa merusak keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut data dari Kementerian Pertahanan masuknya ideologi khilafah ke Indonesia dibuktikan dengan data sebanyak 23,4% mahasiswa setuju dengan konsep negara Islam atau Khilafah, kemudian juga sebanyak 23,3% pelajar SMA setuju dengan negara khilafah.



**Gambar 1.1** Data statistik terpapar ideologi Khilafah  
Sumber : File Kemhan

Selain itu dari kalangan professional pun seperti pegawai negeri sipil (PNS), pegawai BUMN maupun pegawai swasta menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila, jumlahnya sekitar 18,1%-19,4%.



**Gambar 1.2** Presentasi kaum profesional yang menunjukkan tidak setuju dengan ideologi Pancasila  
Sumber : File Kemhan

Hal ini tentu menjadi salah satu ancaman bagi keutuhan NKRI kedepannya, Belum lama ini beberapa tahun kebelakang ditemukan indikasi masuknya ideologi khilafah kedalam salah satu institusi besar negara yaitu TNI. Beredar sebuah video di media sosial dimana salah satu oknum prajurit TNI menggaungkan kalimat pro terhadap salah satu kelompok yang kini sudah dibubarkan karena dianggap bisa membahayakan ideologi Pancasila.

Dalam video tersebut tampak oknum TNI ini dengan semangat dan tanpa ragu memperlihatkan bentuk dukungannya disertai

kalimat takbir. Hal ini pun didukung dengan data kementerian Pertahanan pada tahun 2019 yang cukup mengejutkan dimana sekitar 3% Prajurit TNI sudah terpapar radikalisme, padahal TNI dengan sumpah prajurit dan Sapta Marganya menjadi ujung tombak bagi keamanan dan keutuhan negara Republik Indonesia. Ditambah lagi dengan sosok daeng koro yang merupakan oknum anggota TNI yang sudah terjerembab masuk kepada ideologi khilafah dan bergabung kepada kelompok teroris bernama Mujahidin Indonesia Timur yang membantu para militan Laskar Jihad di Poso dan Jemaah Islamiyah. Kita dapat melihat Sapta Marga dan Sumpah Prajurit adalah ideologi yang asas dasarnya mengacu pada landasan hukum yakni Pancasila dan UUD 1945, sehingga jelas apabila seorang anggota TNI menyatakan dukungan kepada salah satu kelompok atau organisasi yang didalamnya ada indikasi tidak berpedoman pada Pancasila maka hal tersebut sudah menyimpang, dan dikhawatirkan di kemudian hari akan menimbulkan suatu permasalahan yang mengancam keamanan negara.





**Gambar 1.3** Sebanyak 3% anggota TNI terpapar radikalisme  
**Sumber :** Data Kementerian Pertahanan RI tahun 2019

Berdasarkan studi literatur yang dilakukan, belum ada tesis program magister yang mengkaji tentang Ketahanan Prajurit TNI dan Kepemimpinan Komandan Satuan dalam menghadapi ideologi khilafah. Namun beberapa penelitian di bawah ini merupakan representasi dari penelitian yang membahas variabel- variabel sebagaimana diungkap dalam artikel ini. Penelitian terdahulu memiliki manfaat bagi kita dalam menyusun penelitian di masa kini, beberapa kegunaan dan manfaat penelitian terdahulu yang relevan diantaranya menjadikan suatu informasi bahwa sesuatu sudah pernah diteliti sebelumnya, menambah semangat dan rasa ingin tahu untuk melakukan penelitian lanjutan, penelitian yang relevan juga bisa menjadi bahan pengembangan bagi penelitian selanjutnya. Penelitian-penelitian yang pernah dilakukan yang relevan dengan Ketahanan Prajurit TNI dan Kepemimpinan Komandan Satuan dalam menghadapi ideologi Khilafah adalah sebagai berikut ;

Yang pertama dilakukan oleh Yanju Sahara, 2017, dengan judul langkah proteksi indonesia terhadap hizbut tahrir, menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang multikultural dengan mengamalkan Pancasila dan pemerintahan yang demokratis, Indonesia juga menjunjung tinggi kebebasan berkumpul, toleransi, serta pluralisme. Lalu yang kedua ada Muhamad Firdaus, 2017, Konstruksi Makna Ideologi Hizbut Tahrir. Penelitian ini ingin mengungkap bagaimana konstruksi nilai ideologi khilafah dan ideologi politik anggota HTI. Kemudian yang ketiga oleh Abdul Wahid, dkk, 2018. Mengkaji tentang Doktrin Khilafah Sebagai Ancaman Terhadap Konstruksi Negara Hukum Indonesia. Menurutnya doktrin khilafah merupakan ancaman yang sangat serius bagi negara indonesia yang berideologi pancasila khususnya terhadap konstusionalitas. Dan yang keempat dilakukan oleh Kemudian Iwan Satriawan,dkk,2019, dalam jurnal tentang Penangkalan Aksi Radikalisme melalui Pembelajaran Ideologi Pancasila dan Budaya Sadar Konstitusi Berbasis Komunitas. Menurutnya Pelatihan merupakan upaya penangkal ideologi extrimisme dimana penerapan falsafah dasar negara dan sikap peduli terhadap konstitusi perlu dilakukan. Hasil kajian memperlihatkan bahwa pelatihan ini berfokus kepada penguatan pendalaman

soal Pancasila dan akal budi paham akan ketentuan dan ketetapan mengenai penangkalan radikalisme di Indonesia sehingga masyarakat mampu memahami dan menilai bahwa ekstrimis radikal penting untuk dicegah. Serta yang kelima oleh Prihandono Wibowo, 2020, Sekuritisasi Wacana Khilafah Di Indonesia. Kajian ini berisi tentang bagaimana khilafah digambarkan melalui penilaian yang kurang baik dan khilafah diartikan berupa bahaya transnasional modern yang berbahaya bagi Indonesia. Terletak pemikiran bawasannya paham khilafah ini seperti anti keberagaman, bertolak dengan falsafah Pancasila, serta pemecah persatuan. Kemudian juga, ungkapan kegamaan tentang khilafah pun dikaitkan dengan ekstrimisme, radikalisme, dan terorisme. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa Sekuritisasi terhadap khilafah mempunyai pengaruh terhadap kebebasan berekspresi serta berpendapat. Banyak yang dapat kita pelajari dari berbagai perspektif yang digunakan dalam penelitian-penelitian di atas, namun kajian tersebut belum secara detail mengungkap perbedaan kasus Khilafah di TNI terhadap bahaya internal TNI. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini yang pertama akan membahas analisis implementasi kebijakan di TNI dalam menghadapi berbagai kondisi ancaman dan

gangguan berbasis ideologi khususnya ideologi khilafah. Yang kedua adalah, penelitian ini juga akan membahas peran komandan satuan dan cara komandan satuan dalam menghadapi ideologi khilafah. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif dalam menganalisis data-data primer dan sekunder. Data akan diperoleh dari sumber literatur, data digital dari media massa dan media sosial, dan wawancara. Oleh sebab itu masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius, sebelum semakin banyak dan bertambah lagi masyarakat Indonesia yang tidak menerima dan menghormati Pancasila sebagai ideologi negara, terlebih anggota TNI sebagai ujung tombak pertahanan negara. Dalam upaya mencegah terpaparnya anggota TNI oleh paham-paham radikalisme maupun khilafah, maka dibuatlah berbagai kebijakan, untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan tersebut berhasil menjadikan para anggota TNI kuat menghadapi ancaman ideologi ini maka pertanyaan penelitian yang akan dibahas pada laporan studi kasus ini, yaitu bentuk kebijakan apa saja yang ada dalam TNI yang digunakan sebagai pedoman untuk menguatkan ketahanan parajurit dalam menghadapi ideologi khilafah, lalu bagaimana implementasi kebijakan tersebut dilakukan oleh para anggota TNI di lapangan.

## **METODELOGI PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, metode analisis deskriptif kualitatif adalah metode yang menggambarkan, menganalisis, dan meringkas berbagai situasi kondisi dari berbagai data yang dikumpulkan dilapangan. (I Made Winartha,2005). Adapun dua sumber data yang dipakai yaitu sumber data primer yang berasal dari wawancara langsung dengan pimpinan satuan maupun narasumber lain yang terkait. Dalam penelitian ini akan dilakukan di Pusat Satuan Teritorial Angkatan Darat yang terpusat pada pimpinan satuan serta beberapa anggota satuan, data sekunder bersumber dari studi pustaka, dokumen negara, maupun surat telegram atau surat keputusan dari instansi terkait. Pengolahan data dilakukan dengan metode triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil dari beberapa sumber yang berbeda, kemudian mereduksi data, menyajikan data, menganalisis dan menarik kesimpulan.

### **Landasan Teori**

Kerangka teoritis diperlukan untuk dapat menganalisa suatu masalah agar mendapatkan hasil analisa yang logis, valid, dan objektif. Dalam penelitian studi kasus ini

penulis menggunakan beberapa landasan teori yaitu teori implementasi kebijakan, ketahanan prajurit, Doktrin, Mental Ideologi dan gaya kepemimpinan. Kemudian setelah dibahas mengenai landasan teori yang digunakan maka dilanjutkan dengan mengupas permasalahan melalui analisis dan pembahasan lalu ditutup dengan kesimpulan.

### **Teori Implementasi Kebijakan**

Menurut Teori George C. Edward (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpendapat bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh :

- a. Komunikasi, keberhasilan implementasi kebijakan didasari atas pemahaman dan juga terlaksananya sasaran dan tujuan dari isi berita kebijakan oleh suatu kelompok penerima kebijakan.
- b. Sumber Daya Manusia, apabila sumber kebijakan telah disampaikan kepada implementor. Akan terjadi hasil yang kurang maksimal apabila sang penerima kebijakan memiliki kapasitas kemampuan daya pikir yang terbatas.
- c. Disposisi, hal ini bisa dikatakan sebagai karakter atau sifat yang dimiliki dari setiap manusia. Seperti kejujuran, berkomitmen, demokratis, dll. Implementasi kebijakan dapat tersalurkan dengan baik apabila setiap orang memiliki disposisi yang baik.

Sebaliknya apabila seseorang memiliki disposisi yang buruk maka akan terjadi hambatan dan kendala.

- d. Struktur Birokrasi, struktur birokrasi memiliki keterkaitan yang amat signifikan dengan struktur organisasi dan struktur organisasi termasuk kedalam hal yang krusial karena menentukan keberhasilan dari implementasi kebijakan.

### **Ketahanan Prajurit**

Menurut Sayidiman Suryohadiprojo, 1997. Dalam Jurnal Ketahanan Nasional. Ketahanan nasional adalah konsep dimana cakupannya yang luas. Jika keamanan komprehensif digunakan untuk menghadapi suatu benturan fisik dengan negara lain, maka ketahanan nasional digunakan untuk menghadapi agresi dari luar, juga untuk mengatasi seluruh tantangan, hambatan, ancaman, dan gangguan yang dirasakan oleh suatu bangsa dalam memperjuangkan kepentingan nasional serta kelangsungan hidupnya. Transformasi adalah proses kompleks yang melibatkan perubahan pada tingkat pribadi, budaya, organisasi, kelembagaan, dan system (O'Brien, dkk, 2013).

Di zaman ini, konsep ketahanan diuji dengan bagaimana masyarakat dapat bertahan dalam menghadapi perubahan

global. Oleh karena itu, ketahanan mengacu pada kapasitas sistem untuk bertahan dalam fungsinya yakni menghadapi gangguan dan perubahan untuk beradaptasi dengan tantangan di masa depan. Kaitannya dengan hal tersebut, ketahanan prajurit TNI mengacu pada sistem bertahan pada kondisi mental dan ideologi setiap prajurit dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan tren yang muncul.

Dengan konsep Transformasi kita bisa menilai dan mengukur ketahanan individu khususnya prajurit TNI. Dari kondisi tersebut betapa pentingnya prinsip yang harus dipegang teguh oleh para prajurit TNI agar dapatnya tercipta kondisi ketahanan yang ideal terhadap ancaman, hambatan, gangguan dan tantangan yang akan datang. Dan untuk menjaga ketahanan prajurit maka doktrin, mental dan ideologi harus terpelihara dengan baik. Maka ketiga komponen tersebut harus selalu diingat oleh setiap prajurit.

### **Doktrin**

Doktrin TNI adalah panduan yang digunakan personil TNI dalam melaksanakan tugasnya yang didasari dari pengalaman sejarah, nilai intrinsik

kejuangan bangsa serta dengan bantuan dari yang bersifat konseptual sampai dengan yang bersifat operasional implementatif. Panduan Doktrin TNI dibutuhkan dalam mendasari pola berfikir, bertindak, dan bersikap dalam rangka melindungi kedaulatan Indonesia, yang berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945 dari berbagai ancaman militer dan nonmiliter terhadap keamanan negara demi kedaulatan wilayah serta perdamaian Indonesia. Buku Doktrin Tentara Nasional Indonesia Tridarma Ekakarma (Tridek), 2010.

Doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi pada hakikatnya adalah ajaran yang diyakini kebenarannya dan dipedomani dalam pembangunan TNI AD. Sebagai doktrin, ajaran-ajaran yang tertuang dalam Doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi bersifat tidak dogmatis dan memerlukan penyesuaian dalam penerapannya. Isi doktrin ini dituntut memiliki kedinamisan yang dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis dan hakikat ancaman serta faktor-faktor berpengaruh, sehingga ajarannya selalu dapat disesuaikan dengan tetap mempertahankan ciri utama matra darat. (Buku Doktrin Kartika Eka Paksi, 2016, Hal 7). Tujuan Doktrin TNI adalah untuk menjadikan TNI berpedoman dalam

melaksanakan tugasnya agar tercipta keseragaman cara berfikir, bertindak, dan bersikap dalam pemeliharaan dan implementasi kekuatan TNI. Hal ini merupakan salah satu indikator yang penting dan juga harus tertanam bagi setiap prajurit TNI.

### **Mental**

Mental merupakan keadaan diri yang tercermin dalam karakter dan budi pekerti dalam menghadapi masalah atau kehidupan. (Buku Petunjuk Pembinaan Mental dan Rohani, 2003). Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa Pembinaan Mental Ideologi merupakan penataan pelatihan kepekaan perasaan persepsi dan pemahaman ideologi terhadap prajurit TNI dan PNS TNI yang serasi dengan norma dan nilai Pancasila demi terwujudnya prajurit Sapta Marga dan Pegawai Negeri Sipil yang militan dan taat setia terhadap NKRI. untuk memelihara mental dan ideologi prajurit sesuai dengan hakikat, tujuan perjuangan, dan jati dirinya prajurit harus mempunyai karakter yang memegang teguh Sumpah Prajurit, berjiwa Sapta Marga, serta menjunjung tinggi Delapan Wajib TNI.

Sapta Marga adalah landasan dan pedoman TNI dalam menjalankan tugas kehormatan prajurit dalam menuntun



mental, budi pekerti serta disiplin prajurit TNI sekaligus manifestasi Pancasila kedalam hati sanubari prajurit TNI. Lahirnya Sapta Marga diharapkan prajurit bertambah sadar tentang posisi, martabat, dan kehormatan tentara, baik sebagai tentara profesional maupun tentara pejuang di dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. (Buku Doktrin Kartika Eka Paksi, 2016, Hal 33-34). Oleh karena itu perlunya kekuatan mental yang harus ada di dalam prajurit TNI agar dapat tetap tegar di dalam pendirian dan tahan dari berbagai serangan mental dari luar.

### **Ideologi**

Kata ideologi memiliki banyak arti. istilah ideologi berasal dari kata “ideo” dan “logi”. Kata “ideo” berasal dari bahasa Yunani eidos, dalam bahasa Latin idea, yang berarti “pengertian”, “ide” atau “gagasan”. Oleh karena itu dapat disimpulkan bawasannya ideologi memiliki makna “pengetahuan tentang ide-ide”, *science of ideas*. (I Gunawan Setiardi, 1993. Hal 17). Istilah ideologi memiliki korelasi dengan bidang-bidang ilmu kehidupan manusia diantaranya Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Sosial, Kebudayaan, Agama. Hal tersebut yang menjadi jalan dan peluang untuk dapat mempengaruhi stabilisasi doktrin,

mental, dan ideologi setiap individu prajurit. ditambah dengan faktor lingkungan sekitar termasuk pimpinan satuan. Tidak hanya di tempat bekerja namun otomatis kondisi lingkungan yang ada pada tempat tinggal kita sendiri dapat sangat memengaruhi pola mentalitas ideologi diri kita.

### **Gaya Kepemimpinan**

Kepemimpinan seorang pemimpin dapat sangat berpengaruh pada kondisi mental dan ideologi seorang anak buah. Dari kepemimpinan yang dilakukan seorang pemimpin tentu ada gaya kepemimpinan masing-masing yang dimiliki setiap pemimpin. Gaya kepemimpinan merupakan bentuk sikap dan perilaku konsisten yang digunakan pemimpin mengendalikan anggota, yaitu sikap dan perilaku yang ditunjukkan pimpinan ketika memperlakukan bawahan, seperti dipersepsikan orang lain. Gaya bukanlah ketika pimpinan menilai sikap diri pribadi ketika memimpin, melainkan tentang bagaimana pemikiran publik, yang paling utama adalah anggota bawahan terhadap sikap pimpinan (Hersey dan Blanchard, 1992).

Antara “Kepemimpinan Militer (TNI)” dengan “Komando” memiliki hubungan yang erat, karena

“Kepemimpinan” merupakan langkah yang menghidupkan perhatian dan gelora semangat anggota dalam menggapai tujuan bersama dengan berhasil dan bermanfaat, sedangkan “Komando” merupakan proses jalannya kewenangan pimpinan terhadap anggotanya. Kepemimpinan yang baik melahirkan kepatuhan yang ikhlas terhadap komando. Pengomandoan yang berdasarkan sifat dan azas-azas kepemimpinan akan menciptakan keberhasilan yang baik, sehingga kepemimpinan merupakan ilmu atau pengetahuan yang dapat dipelajari dan dipraktekkan oleh siapa saja.

Kepemimpinan bukan berasal dari keturunan atau pembawaan sejak lahirnya manusia akan tetapi merupakan kemampuan dan skill yang dapat dimiliki oleh siapapun yang mempunyai kecerdasan memahami azas-azas kepemimpinan yang sehat, penggunaan prinsip-prinsip serta tehnik serta metode yang sebaik-baiknya dan ini merupakan konsep dasar kepemimpinan menurut dokumen TNI dari (Buku Hanjar Kepemimpinan TNI, 2012. Hal 7).

Beberapa jenis gaya kepemimpinan diantaranya gaya kepemimpinan otokratis, gaya kepemimpinan birokratis, gaya kepemimpinan demokratis, gaya

kepemimpinan bebas, gaya kepemimpinan militeristis, gaya pemimpin paternalistis, kepemimpinan karismatik, kepemimpinan modern.

## **ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Setiap manusia memiliki jalan dan kehidupannya masing masing dan dapat merubah kehidupannya dengan pola pikirnya sendiri (Halimin Suhas, 2017). Hal tersebut menunjukkan bawasannya manusia dapat mengubah dan juga memiliki kekuatan positif dalam mengkontruksi kehidupan sosial bermasyarakat dan bernegara. Semua berjalan dan berkembang oleh mindset atau cara berfikir individu yang melahirkan ide dan doktrin untuk menentukan ataupun mempengaruhi seseorang sehingga menjadi sesuatu yang sulit dihindarkan ketika bersosialisasi dalam kehidupan. Dari interpretasi pola pikir tersebut munculah berbagai doktrin dan paham yang dikembangkan oleh seseorang atau sekelompok golongan. Dan dari hasil apa yang telah dikembangkan dari doktrin tersebut setiap manusia memiliki hak untuk menentukan, mulai dari hal inilah doktrin dapat diterima atau selanjutnya dapat diyakini kebenarannya untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari hari. Ketika suatu ajaran atau doktrin dapat diterima dimasyarakat sementara dari ajaran tersebut

merupakan hal yang bertentangan dengan doktrin yang benar, maka situasi tersebut dapatlah menimbulkan suasana yang tidak nyaman di hati atau menjadi kegundahgulana publik.

Salah satu doktrin yang dipahami dan diyakini oleh sekelompok orang adalah doktrin khilafah. Doktrin tersebut digunakan bagi beberapa kelompok pengusung khilafah seperti HTI, Salafi Muslimin, FPI, dll. Khilafah merupakan suatu *soft power* yang dikatakan tabu bila di negara Indonesia akan tetapi tidak bisa juga langsung di *judge* sebagai *threat* karena sistem di dalamnya dinilai baik dan mengedepankan kaidah kaidah agama sesuai tuntunan nabi dan rasul. Sehingga dari hal tersebut menjadikan khilafah menjadi hal yang bersifat kontroversional dikalangan umat negeri kita dan menjurus kearah negatif. Dalam prinsip yang diyakini, Perbedaan yang beragam di negeri ini tidak membenarkan hukum yang berdasarkan pancasila melainkan meyakini serta memercayai pemahaman khilafah merupakan hal yang dianggap “paling benar”. Hal tersebut yang menjadi prolem tersendiri bagi hukum yang ada di indonesia sekarang hingga masa yang akan datang.

Ancaman yang kini datang sangat bersifat dinamis juga jenisnya yang beragam,

seperti ancaman militer, non militer dan juga gabungan dari kedua ancaman tersebut atau bisa dinamakan hibrida (Buku Doktrin Kartika Eka Paksi. 2016, hal 52). Ancaman yang saat ini akan dibahas adalah ancaman ideologi, hal ini termasuk ancaman nonmiliter, yaitu ancaman yang tidak menggunakan senjata seperti perang konvensional namun mempengaruhi pola pikir setiap orang yang jika dibiarkan berkembang imbasnya akan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. salah satu contoh ancaman terhadap ideologi adalah dengan munculnya paham khilafah di Indonesia.

Khilafah atau sistem pemerintahan yang mana sistem ini bergerak menyusup pada isu politis. Hal ini masih dianggap sangat laten untuk dapat muncul kembali dan mengancam eksistensi Pancasila baik saat ini maupun kedepan. Ditambah seiring perkembangan zaman ancaman tersebut diprediksi dapat masuk kedalam sendi sendi kehidupan negara bahkan bisa mencuci otak masyarakat Indonesia, mempengaruhi banyak orang muslim yang ada di Indonesia. Tidak hanya orang sipil namun hal tersebut telah memengaruhi beberapa institusi aparatur negara salah satunya TNI.

Paham khilafah bertolak belakang dengan norma nilai Pancasila, oleh karena itu apabila seorang TNI mulai terpapar akan sangat membahayakan bagi keutuhan pertahanan negara, dari hasil analisis faktor penyebab bisa masuknya paham radikalisme ataupun khilafah ke dalam TNI diantaranya dikarenakan pengaruh media sosial. Bisa juga melewati acara-acara kajian rutin atau dari program pengajian-pengajian yang umum ada di sekitar. Di era globalisasi ini, media sosial memiliki peran aktif dalam segala bentuk informasi. Informasi yang masuk bersifat bebas dan tidak terkendali. Siapapun akan mengetahui segala bentuk informasi yang ada di handphone dan dari media sosial inilah awal gerbang pintu masuknya paham radikalisme global yang dapat memberikan dampak bagi kehidupan bernegara. Menurut teori Horrace Kellin paham radikalisme terbagi antara dua jenis yaitu radikal kiri dan paham radikal kanan yang mana inti dari paham radikal adalah terjadi akibat fenomena politik yang tidak terwadahi dengan baik. Begitupun dengan media sosial yang dapat memberikan efek serta dampak perubahan cara pandang, norma, perilaku, etika bermasyarakat. Kedua disebabkan karena dasar ideologi Pancasila yang dipegang mulai memudar, disamping itu dangkalnya iman seseorang yang mudah dipengaruhi dan

diprovokasi, menganggap ilmu tentang pemahaman negara Islam atau ideologi khilafah merupakan landasan ideologi bangsa yang terbaik, adanya fanatisme yang berlebihan kepada salah satu tokoh agama yang menegakan khilafah atau organisasi, kurangnya pemahaman yang dalam dalam diri seseorang dari falsafah Pancasila tersebut sehingga menjadi dasar negara yang tidak bisa diganggu gugat, jika hal ini dibiarkan menyebar maka akibatnya tidak menutup kemungkinan sedikit demi sedikit akan mengancam ideologi Pancasila dan akan mudah terjadinya perseteruan atau perpecahan didalam tubuh TNI, jika TNI sebagai garda depan pertahanan sudah tidak kokoh tentunya akan sangat mudah bagi musuh untuk menyusup dan memecah belah TNI, maka pertahanan dan keamanan negara pun menjadi terganggu.

Adapun alternatif penyelesaian masalah yang diambil oleh TNI saat ini adalah dengan menekankan kembali secara intensif kepada pedoman Undang-Undang dan kebijakan-kebijakan yang telah ada. Berikut merupakan beberapa kebijakan yang ada :

1. UU TNI No 34 Tahun 2004 Bab IV Pasal 7 ayat 4 yang berisikan Tugas Pokok TNI khususnya pada Operasi Militer Selain Perang (OMPSP) yaitu salah satunya untuk mengatasi aksi terorisme dimana embrionya

berasal dari radikalisme. Kemudian pasal 7. Pembahasan kedua adalah terdapat pada ayat 9, yang berbunyi membantu tugas pemerintah di daerah dan poin poin 10 yang berbunyi membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang undang. Keterlibatan TNI menanggulangi terorisme dalam kerangka perbantuan terhadap pemerintah sipil dan juga keamanan nasional harus berdasarkan kebijakan politik negara. Sebagaimana yang tertera dalam undang undang TNI No 34 Tahun 2004 tentang TNI dan undang undang No 2 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dalam keadaan genting yang mana TNI harus dikerahkan langsung oleh Presiden dan harus dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam waktu 2x24 jam terhitung saat dikeluarkan putusan untuk pengerahan kekuatan. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin supremasi sipil atas militer dan menjaga akuntabilitas TNI dalam rangka menangani aksi terorisme. Oleh karena itu sangat penting perlunya implementasi dari kebijakan UU TNI No 34 Tahun 2004 mengingat sudah merupakan tugas TNI dalam hal OMSP untuk mengatasi aksi terorisme dan menangkal paham radikal, dan juga TNI adalah garda terdepan dalam memelihara dan menjaga stabilitas keamanan negara.

2. Perpres No 8 tahun 2021 tentang Kebijakan Hukum dan Pertahanan Negara 2020-2024. Pada halaman 4, berdasarkan perkembangan lingkungan strategis, prediksi ancaman semakin kompleks. Ancaman militer, ancaman non militer dan ancaman hibrida. Dan beberapa ancaman tersebut bersifat aktual dan potensial. Hal tersebut dijelaskan pada analisis perkembangan lingkungan strategis poin 'a'. Ancaman aktual merupakan ancaman yang berkelanjutan dan bisa datang darimana saja, baik dari dalam maupun luar. Salah satu dari ancaman tersebut adalah terorisme dan radikalisme. Maka ancaman ini tergolong masuk kedalam ancaman nirmiliter, hal tersebut ditinjau dari Landasan Kebijakan Umum Pertahanan Negara, poin 'c', tentang Landasan Konsepsional yaitu pertahanan militer merupakan pertahanan untuk menghadapi ancaman non militer yang berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

3. Kep/555/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018 tentang Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma. Bab 3 mengenai Ancaman dan Gangguan yang disebutkan pada poin 1 ancaman non militer yakni ideologi. Dijelaskan bawasannya ancaman yang berdimensi ideologi adalah berkembangnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila baik dari sektor eksternal seperti faham

liberalisme dan komunisme. Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma merupakan salah satu kebijakan dan Strategi yang diperlukan TNI dalam menghadapi ancaman dan gangguan keutuhan wilayah NKRI. Kebijakan ini dirumuskan sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pertahanan negara yang diorientasikan agar mampu melaksanakan tugas pokok TNI, baik dalam konteks penggunaan dan juga pembinaan dalam rangka mewujudkan dan merealisasikan kebijakan TNI.

4. Kep/555.a/VI/2018 tanggal 1 Juli 2018 tentang Doktrin Kartika Eka Paksi halaman 8 dimana peran TNI dalam menghadapi ideologi khilafah terdapat pada Fungsi Teknis Khusus yang mana pada realisasinya melaksanakan Fungsi Pembinaan Mental Prajurit. Fungsi ini menyelenggarakan pembinaan mental rohani, mental ideologi dan mental kejuangan terhadap Prajurit TNI AD dan PNS TNI AD beserta keluarganya. Fungsi teknis khusus pada Doktrin Kartika Eka Paksi sangatlah penting untuk memelihara dan meningkatkan ketahanan prajurit dalam kesehariannya melaksanakan tugas dimanapun karena telah mencakup berbagai aspek. Dari Jasmani Militer, Pembinaan Mental, Psikologi, Penelitian dan Pengembangan, Sejarah, serta Informasi dan Pengolahan Data.

5. Kep/1069/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Petunjuk Induk Teritorial yang mana dalam melaksanakan fungsinya menggunakan objek dan metode. Dimana objek terdiri dari Geografi, Demografi dan Kondisi Sosial. Dalam menghadapi *current issue* atau isu terkini terutama masalah ideologi khilafah. Fungsi kondisi sosial begitu relevan karena kondisi sosial yang didata, dimonitor, dan dikelola untuk kepentingan aspek darat yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya. dalam rangka pertahanan negara, menggunakan metode Komunikasi Sosial (Komsos), Bhakti TNI, dan pembinaan ketahanan wilayah (Bintahwil). Komunikasi sosial merupakan suatu acara yang diselenggarakan TNI dalam rangka menjalin tali silaturahmi antara TNI dan Rakyat yang berisikan kegiatan kegiatan yang menciptakan hubungan emosional dengan TNI guna terwujudnya saling pengertian yang dapat meningkatkan kebersamaan sehingga masyarakat secara sukarela berpartisipasi pada kepentingan pertahanan negara.

6. Surat Telegram KSAD Nomor ST/2450/2019 16 Agustus 2019 tentang Himbauan dalam rangka meningkatkan iman dan taqwa personil yang beragama islam di lingkungan TNI AD beserta keluarga dalam kegiatan PHBI, Ceramah, Kuliah Shubuh dan

Khotbah agar materi ceramah memperhatikan ketentuan yang telah dikeluarkan oleh kebijakan Pimpinan TNI. Seperti penjelasan diatas, surat telegram ini mengacu dari kebijakan yang telah dibuat sebelumnya. Surat telegram ini pun merupakan salah satu contoh kebijakan yang telah dibuat TNI untuk menghimbau dan bersifat sebagai pencegahan dalam menghadapi kondisi mental dan ideologi prajurit saat ini yang telah diketahui tengah mengalami penurunan mental ideologi dan terpengaruh oleh ideologi diluar pancasila. Oleh sebab itu, seperti apa yang telah dijelaskan dalam tabel keterangan diatas dalam surat telegram ini maka dengan dikeluarkan kebijakan oleh pimpinan TNI melalui surat telegram ini merupakan salah satu langkah preventif pimpinan TNI dalam memelihara kondisi ketahanan prajurit khususnya dalam pembinaan mental dan ideologi di masa sekarang.

7. Surat Telegram Kasad Nomor ST/633/2020 tanggal 25 Februari 2020. Tentang himbauan dalam rangka meningkatkan iman dan taqwa bagi prajurit dan PNS TNI AD beserta keluarganya. Mengapa surat telegram ini diterbitkan oleh TNI? dikarenakan dengan adanya contoh kasus yang telah viral dikalangan TNI dan Publik mengenai salah satu oknum TNI yang telah terpapar oleh paham khilafah. Maka

salah satu bentuk upaya TNI dalam rangka mencegah paham dari luar adalah dengan tidak diperkenankan untuk mengundang penceramah dari rohaniawan yang berasal di luar TNI. Untuk itu Dinas Pembinaan Mental TNI di masing masing angkatan memiliki Rohaniawan yang bertugas untuk memberikan pencerahan dan juga pemahaman rohani yang tidak melenceng dari ideologi Pancasila agar mengisi kegiatan kegiatan kerohaniawan dalam rangka pembinaan mental dan ideologi prajurit.

8. Surat Telegram Kasad Nomor ST/2496/2020 tanggal 14 September 2020. Surat ini berisikan undangan pemberitahuan bahwa Pusat Pembinaan Mental TNI akan menyelenggarakan Round Table Discussion (RTD) Pembinaan Mental Psikologi Tahun Anggaran 2020 kepada satuan jajaran TNI dengan tema Peran Bimbingan Konseling Dalam Mewujudkan Mental Prajurit TNI Yang Bermental Tangguh. Pada kegiatan tersebut membahas pada dasarnya RTD Pembinaan Mental merupakan wadah untuk mengevaluasi peran mental prajurit dalam menghadapi kondisi nyata saat ini. Kegiatan ini juga sebagai ajang komunikasi antara Pusat Pembinaan Mental TNI dengan Dinas Pembinaan Mental di setiap matra angkatan. Dengan adanya RTD ini diharapkan terciptanya keharmonisan dan kesamaan

pandangan dalam rangka upaya bersama dalam menyelenggarakan kegiatan pembinaan mental secara terpadu demi tercapainya pelaksanaan pembinaan mental yang efektif dan efisien. Terutama dalam mencari solusi permasalahan yang tengah dihadapi oleh Prajurit TNI beserta keluarganya dalam perspektif pembinaan mental.

9. Surat Telegram Kasad Nomor ST/469/2021 tentang Penekanan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kerohaniawan di Lingkungan TNI. Surat penekanan ini merupakan bentuk surat himbuan sekaligus mengingatkan kembali kepada seluruh prajurit agar dalam melaksanakan kegiatan kerohaniawan, tidak mengundang penceramah dari luar karena di tahun 2021 ini ideologi khilafah lebih bersifat transnasional. Bermula dari hubungan sosial atau pertemanan dalam realita di lingkungan kemudian menjadikan awal gerbang bagi mereka yang secara halus dan juga mendalami kedekatan dengan TNI untuk dapat menyebar paham khilafah. Bisa berawal dari kegiatan kajian, kemudian pemberian sedekah sukarela atau juga dari bermedia sosial. Karena kehadiran zaman sekarang memberikan pengaruh politik, ekonomi, ideologi dan sosial budaya yang memengaruhi kondisi nasionalisme prajurit.

Itulah beberapa kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah dan TNI. Bahwa dengan dikeluarkannya kebijakan kebijakan tersebut merupakan salah satu langkah preventif untuk meminimalisir paham radikal luar yang masuk. Yang pertama kita bisa melihat dari kebijakan TNI pertama dari KEP/555/VI/2018 tentang doktrin TNI. Dalam pelaksanaan tugasnya, kebijakan tentang doktrin ini dimaksudkan kepada seluruh prajurit untuk menyelaraskan dengan situasi dan perkembangan strategis dari tingkat regional, nasional sampai dengan internasional. Artinya implementasi dilapangan dari kebijakan tersebut adalah bahwa prajurit harus mampu beradaptasi dengan lingkungan dan tantangan yang begitu kompleks seiring pesatnya ilmu dan pengetahuan teknologi. Kemudian berangkat dari kebijakan kebijakan tersebut, juga untuk mengantisipasi tuntutan serta tantangan yang begitu kompleks, maka kebijakan doktrin didesain secara komprehensif dan *up to date* dan dapat dioperasionalkan. Doktrin ini terdiri dari rumusan kebijakan dan strategi TNI dalam menangkal dan menghadapi berbagai ancaman dengan mempertimbangkan aspek, nilai, sejarah serta pengalaman operasi dan asas asas yang diperlukan sehingga TNI lebih profesional modern dan adaptif terhadap kondisi dan



situasi terkini. disinilah peran kepemimpinan hadir dan selain membahas karakter gaya kepemimpinan TNI yang harus dimiliki pimpinan. Para Komandan Satuan perlu melaksanakan langkah langkah pencegahan bagi satuan di jajarannya masing masing. Salah satunya yang pertama adalah meningkatkan pelaksanaan program teritorial di bidang deradikalisasi. Dan tentu saja TNI dalam mencegah paham khilafah dan radikalisme. TNI dan Pemerintah harus berkolaborasi secara terstruktur sistematis dan masif. kesadaran bela negara merupakan hal yang esensial yang harus dimiliki oleh warga negara indonesia sebagai wujud modal dasar sekaligus membangun kekuatan bangsa untuk menjaga ketahanan individu dan keutuhan NKRI. Dan pimpinan harus bisa memberikan contoh semangat militansi dalam kehidupan sehari hari. Dapat mengoptimalkan pembinaan mental kepada prajurit TNI dan PNS beserta keluarganya secara kreatif dan inovatif diantaranya mendalami dan juga belajar dengan sungguh sungguh dalam mempertajam materi dan metode tentang jati diri TNI dengan mengedepankan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI sebagai pedoman mutlak menuju jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional dan tentara profesional. Semua ini merupakan alur rangkaian

penguatan pemahaman prajurit TNI dalam menghadapi era globalisasi yang semakin kompleks. Pembinaan Mental TNI memiliki peran yang vital dan tidak bisa lepas dari struktur inti TNI. Dan dalam perannya diharapkan selalu melekat pada tugas pokok TNI dalam merealisasikan program penguatan mental TNI dalam menghadapi paham atau ideologi eksternal. Upaya tersebut antara lain menjadikan prajurit bermental tangguh, yaitu prajurit yang menjunjung tinggi sapta marga, kemudian memiliki semangat nasionalis dan militansi yang kokoh serta sehat psikologinya agar prajurit prajurit tersebut akan selalu siap dan optimal dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Dengan begitu, para pimpinan harus lebih menggunakan pendekatan yang ekstra kepada bawahannya agar dapat menyalurkan informasi dari kebijakan yang sudah ada. Salah satunya ialah dengan menggunakan metode jam komandan dimana pada jam ini seluruh anggota dikerahkan untuk dapat hadir mengikuti pengarahan dan instruksi dari pimpinan sehingga tidak ada lagi anggota yang merasa tidak mengetahui dari kebijakan yang sudah ada. Dengan begitu diharapkan seluruh prajurit dan PNS TNI dapat mengaplikasikan dan mengimplementasikan kebijakan kebijakan yang sudah diturunkan sehingga terjadi upaya bahu membahu antar

sesama, dan mengingatkan untuk mewujudkan tujuan dari kebijakan yang sudah ada, demikian agar terhindar dari ancaman dari juga terproteksi dari serangan serangan yang akan mengganggu stabilitas keamanan negara ini

## **KESIMPULAN**

Ideologi khilafah saat ini sedang menjadi atensi TNI, karena dikhawatirkan akan menjadi ancaman separatis kedepan apabila tidak segera dilakukan upaya pencegahan. dengan kondisi di jaman sekarang maka penting tentang adanya penguatan mental dan ideologi. Dalam pelaksanaannya, TNI membuat Kebijakan dalam menghadapi ideologi khilafah. Dengan dilakukannya penelitian mengenai kebijakan kebijakan yang telah diterbitkan maka secara umum kebijakan dari mulai Undang Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 sampai dengan himbauan himbauan yang dikeluarkan melalui Surat Telegram KSAD adalah upaya dan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok TNI kedepan. Agar TNI senantiasa berpegang teguh pada landasan negara ini yaitu Pancasila. sebab kebijakan dibuat seiring dengan perkembangan situasi dan jaman. Dengan adanya beberapa kasus yang muncul di ranah TNI maka fungsi kebijakan ini adalah sebagai langkah preventif demi

memelihara organisasi yang baik dan mewujudkan kondisi pertahanan yang kuat. Jadi bentuk-bentuk kebijakan yang ada pada TNI untuk menghadapi ideologi khilafah atau paham paham radikal lainnya terdiri dari UU, Perpres, yang diturunkan ke dalam doktrin dan surat telegram pimpinan yang diimplementasikan dalam bentuk program-program guna menguatkan ketahanan mental prjurit dalam menghadapi ideologi khilafah.

Tidak hanya kebijakan saja namun peran Komandan Satuan dalam menghadapi ideologi khilafah sangat penting karena komandan merupakan figur yang memberi contoh terhadap anggotanya kemudian sebagai tolak ukur prajurit dalam membangun semangat nasionalisme dan juga militansi bagi setiap individu prajurit, dari hasil analisis disimpulkan bahwa implementasi kebijakan kebijakan yang ada telah berjalan dengan baik di Pusat Teritorial Angkatan Darat ini, ditandai dengan tidak adanya pelanggaran pelanggaran yang bersifat seperti contoh kasus yang muncul ke permukaan.

Hal tersebut menjadikan satuan ini dapat mengimplementasikan kebijakan Komando Atas dengan baik. Akan tetapi tetap satu sama lain untuk konsisten dalam

menjalani kebijakan kebijakan tersebut dan juga saling mengingatkan untuk tetap teguh dalam prinsip yakni berpedoman kepada Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI yang berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945.

### **Rekomendasi untuk Instansi**

Dengan adanya analisis kebijakan yang telah dibahas kita mengetahui bawasannya isi kandungan dari beberapa kebijakan tersebut sangatlah penting dan menjadi pedoman bagi institusi dalam melaksanakan tugas pokoknya. Oleh karena itu hal ini tidak bisa dianggap sebelah mata. Perlu pendalaman yang lebih agar seluruh institusi mengetahui apa dan harus berbuat apa dengan berjalannya waktu dan majunya perkembangan zaman ini. Apalagi dengan sudah terjadinya beberapa kasus yang muncul di beberapa satuan TNI. Hal tersebut merupakan warning bagi satuan dan juga khususnya Komandan Satuan yang mengawaki dan memimpin satuan tersebut agar dapatnya melakukan tindakan pencegahan sedini mungkin.

Mengadakan acara sosialisasi tentang penguatan ideologi Pancasila, kemudian mengadakan acara jam komandan untuk sharing dan juga mengadakan program pembinaan mental dalam rangka

membangun jati diri dan karakter prajurit yang kuat harus sebisa mungkin ditingkatkan. Mengapa demikian, hal ini sangatlah penting mengingat karakter dan mental prajurit seiring waktu dan pergantian generasi mengalami penurunan.

Membangun kerjasama dengan pemerintah dan stakeholder terkait untuk sama sama berforum diskusi dalam rangka mencari solusi perlu ditingkatkan agar dapat memaksimalkan peran TNI dalam pemberdayaan wilayah untuk menunjang 5 kemampuan teritorial dalam TNI yang bertujuan menekan penyebaran paham paham yang melenceng dari ideologi Pancasila.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **BUKU**

Anderson, James E. (1979). *Public Policy Making*. Boston: Houghton Mifflin.

A. G Subarsono, (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Bass MB, Avolio B. (1994). “*Improving Organizational Effectiveness Through Transformational Leadership*”, SAGE USA.

- Buku Doktrin Kartika Eka Paksi. (2016). Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
- Buku Doktrin Tentara Nasional Indonesia (TRIDEK), (2010). Markas Besar Tentara Nasional Indonesia.
- Buku Pembinaan Mental dan Rohani, (2003). Dinas Pembinaan Mental dan Ideologi.
- Dunn, William N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gunawan, Setiardi. (1993). *Hak Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta : Kanisius.
- Halimin Suhas, (2017). *Mewujudkan Jalan Pencerahan*. Jakarta: Hilman Media.
- Hanjar Kepemimpinan TNI. (2012). Markas Besar Angkatan Darat Sekolah Staf dan Komando.
- Hersey dan Blanchard, (1992). *Manajemen Perilaku Organisasi*. Jakarta :Erlangga.
- John W. Creswell, (2016). *Research Design; Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Edisi Keempat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lexy J. Moleong, (2010), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm 155.
- O'Brien, K. and L. Sygna. (2013). *The Three Spheres of Transformation, In Proceedings of Transformation in a Changing Climate*, 19-21 June 2013, Oslo, Norway. Oslo University.
- Sugiono, (2010). *Sistem Metode Penelitian*, Jakarta.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- Winarno, Budi. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

#### JOURNAL ARTICLES

- Wahid, A., Sunardi,S, & Kurniawati, D.A. (2018). *Doktrin Khilafah Sebagai Ancaman Terhadap Konstruksi Negara Hukum Indonesia*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, e-ISSN 2614-3992. Vol 1, No 2, Juni 2018, Halaman 206-220.

**INTERNET (ONLINE JOURNALS)**

Suryohadiprojo,S. (1997). *Ketahanan Nasional Indonesia*. Jurnal Ketahanan Nasional 1997, No 2 Hal 1.

<http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/detail.php?dataId=7234>

**INTERNET (BAHAN DISKUSI):**

Egy, Adytama, 20 Juni 2019. Rapat Diskusi Menhan beserta Panglima TNI dan Jajaran Staf Mabes TNI serta Purnawirawan TNI , diakses 12 Desember 2021 (Online)

[nu.or.id.2018](http://nu.or.id.2018).

**TESIS, DISERTASI, DAN JURNAL**

Alaika M, Bagus Kurnia PS, Abdurohman Wahid, Gaing Perwira Yustika. (2018). *Kontroversi Penerapan Khilafah di Indonesia*. Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu Ilmu Keislaman,

p-ISSN:1693-8712|e-ISSN: 2502-7565 Vol. 18, No. 01, Juli 2018.pp 19-24.

Muhammad, A., Ari,P. *Analisa Pelibatan TNI AD Dalam Menanggulangi Terorisme Di Indonesia (Studi Wilayah Kodim 0612/Tsm)*. Jurnal Prodi. idu. ac.id, 2018, Hal 8.

Nilda Hayati, (2017). *Konsep Khilafah Isslamiyah Hizbut Tahrir Indonesia Kajian Living Al Quran Perpektif Komunikasi*. Jurnal Episteme, Vol. 12, No. 1, Juni 2017.

**SUMBER LAINNYA**

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka,1997), 239.

Gatot Nurmantyo dalam acara peluncuran bedah buku, tanggal 23 Agustus 2017

[www. Defense-Update.Co](http://www.Defense-Update.Co)

[www. Kompasiana.com](http://www.Kompasiana.com)